

DAMPAK SOSIAL PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN

DI DESA PATIMBAN

Adam Hiqmatullah¹⁾, Ali Alamsyah Kusumadinata^{2*)}

¹² Program Studi Sains Komunikasi, Universitas Djuanda, Indonesia

adamhiqmah17@gmail.com¹⁾; ali.alamsyah@unida.ac.id^{2*)}

Received: 24-09 2023

Accepted: 15-10-2023

Published: 28-10-2023

Abstrak

Pembangunan sosial merupakan pembangunan yang memberikan keadilan sosial bagi masyarakat baik dalam hal ekonomi, ekologi dan keberlanjutan masyarakat. Pembangunan memberikan efek kepada manusia yang menghuni di wilayah tersebut. Pembangunan memberikan dampak utamanya adalah dampak sosial yang memberikan tata laksana dalam kehidupan di masyarakat agar mampu meneruskan kehidupan yang lebih berlanjut. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana dampak yang diberikan oleh pembangunan pelabuhan Patimban. Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dengan adanya pembangunan semakin melemah. Oleh karena itu pemerintah dan pihak swasta yang terlibat memberikan dukungan dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan tersebut. Hal lain adalah kehilangan mata pencarian yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Keberlanjutan pembangunan memberikan kehilangan kesempatan masyarakat untuk tinggal dan tumbuh di lingkungan Desa Patimban. Kedampaan ini memiliki konsekuensi untuk mencegah terhadap konflik sosial dengan memberikan pendampingan dan bantuan permodalan dalam berusaha mikro. Hal ini menurunkan kesenjangan yang tinggi terhadap kemiskinan yang terbentuk oleh pembangunan pelabuhan. Kemampuan masyarakat dalam retensi pembangunan memiliki kekuatan yang baik untuk bertahan dengan memperoleh bantuan dan pendampingan. Hal ini meredam kemiskinan di masyarakat desa.

Kata Kunci: Pelabuhan; Pembangunan; Dampak; Masyarakat terdampak

SOCIAL IMPACT OF PATIMBAN PORT DEVELOPMENT IN PATIMBAN VILLAGE

Abstract

Social development is a development that provides social justice for the community in terms of economy, ecology, and community sustainability. Development has an effect on the humans inhabiting the region. Development has a main impact on social impacts that provide governance in life in the community in order to be able to continue a more sustainable life. The purpose of this study is to see how the impact is given by the development of Patimban Port. This research method uses a qualitative approach using interview and observation techniques. The findings in the field show that the community's ability to develop is weakening. Therefore,

the government and private parties involved provide support by involving the community in the development. Another thing is the loss of livelihoods that have an impact on the economy of the community. The sustainability of development gives the community the opportunity to live and grow in the environment of Patimban Village. This craze has consequences to prevent social conflicts by providing assistance and capital assistance in micro-business. This lowers the high gap in poverty formed by port development. The ability of the community in development retention has good strength to survive by obtaining assistance and assistance. This reduces poverty in rural communities

Keywords: *Port; Building; Impact; Affected Communities*

PENDAHULUAN

Dampak sosial merupakan salah satu indikator dalam pembangunan menginterpretasikan arti dari suatu pembangunan. Pembangunan pasti memiliki dampak negatif dan positif dalam perspektif di masyarakat dan penilaiannya. Dampak sosial terdiri atas dampak sosiologis, dampak psikologis dan dampak ekonomi. Kurniawan (2021) menyatakan bahwa dampak pembangunan mampu memberikan rasa kebanggaan masyarakat terhadap pembangunan yang terjadi. Hamzah & Suhenda (2020) menyatakan bahwa modal sosial merupakan bagian dari parameter dari dampak sosial yang dihitung dalam satu satuan program. Keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari program pembangunan mampu memberikan perspektif positif terhadap pembangunan. Dampak memberikan korelasi dengan modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, jaringan, dan aturan yang diregulasikan oleh pemerintah maupun kesepakatan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memberikan alternatif baru bagi masyarakat untuk dapat menikmati pembangunan dan sumber-sumber pembangunan yang ada (Kurniawan W. , 2015).

Hamzah et al. (2018) menyatakan bahwa dampak dari kegiatan pembangunan berhasil adalah masyarakat mampu berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang menambah pendapatan masyarakat dan memiliki akses kepada bagian-bagian vital. Penelitian Iryana (2018) menunjukkan terdapat tiga dampak yang terjadi ketika pembangunan pelabuhan Patimban terjadi dan telah terjadi yaitu dampak sosial ekonomi, dampak mobilitas dan dampak cara hidup masyarakat dalam bertahan. Yusuf et al. (2005) kasus pembangunan pelabuhan perikanan Lempasing, Bandar Lampung memberikan dampak kepada masyarakat khususnya nelayan, pedagang, petani dan masyarakat yang terkena dampak. Dampak ini berupa pendapatan dan kesempatan kerja yang lebih baik dengan meningkatkan kenaikan 45% dari sebelumnya. Seherman & Dault (2009) dalam penelitiannya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Jemberana di Bali juga mengungkapkan bahwa terdapat keuntungan pada masyarakat pada sisi kesejahteraan yang meningkat dan kesempatan berusaha lebih baik. Manfaat lain adalah penurunan biaya operasional kapal, penambahan waktu penangkapan, waktu bongkar yang menjadi relatif singkat, peningkatan kualitas ikan,

peningkatan dan kestabilan harga yang diterima nelayan, peningkatan produksi ikan, dan bertambahnya jumlah kapal penangkap.

Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan bongkar muat kontainer dan kendaraan dengan taraf internasional yang saat ini pengerjaannya dilakukan oleh pemerintah di era presiden Joko Widodo. Rencana proyek pembangunan pelabuhan Volume kargo yang dimiliki akan disamakan seperti Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia. Lokasi kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban berada di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, dengan batas wilayah sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah selatan Jalan Nasional Pantura (Kecamatan Pusakanagara dan Pusakajaya), sebelah timur Kabupaten Indramayu, sebelah barat dengan tambak dan Persawahan (Kecamatan Pusakanagara). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam meminimalisasi dampak yang terjadi dan melihat persepsi harapan masyarakat yang terdampak oleh pembangunan Pelabuhan Patimban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendelitain kualitatif dimana menemukan konsep baru berkenaan dengan pendalaman suatu materi atau instrumen penelitian. Penelitian ini melihat bagaimana intrumen yang diharapkan masyarakat sebagai bagian timbal balik dari pembangunan pelabuhan Patimban terutama pada areal yang terdampak. Penelitian ini mengambil informan dari tokoh desa, tokoh keamanan dan masyarakat

perwakilan. Teknik penelitian dengan wawancara mendalam mengetahui kasus yang terjadi terhadap dampak dan harapan masyarakat dalam pembangunan pelabuhan Patimban tersebut. Data diolah dengan verbatim yang menjelaskan masing-masing pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan membahasnya dengan pendekatan konstruktifisme dalam pembahasan (Moleong, 2017). Data diolah dan disimpulkan menjadi satu kesimpulan umum yang digeneralisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah yang diambil dalam meminimalisasi dampak yang terjadi dalam pembangunan Pelabuhan Patimban yang dilakukan pemerintah dengan membangun dan mengembangkan persepsi yang baik kepada masyarakat dengan membuat forum FGD sehingga munculah program yang berjalan yaitu program yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak pembangunan tersebut. Sehingga mampu meminimalisasi penyimpangan sosial akibat pembangunan itu sendiri. Beberapa program yang berjalan adalah (1) Program pelatihan kerja, program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi lingkungan sekitar, dan untuk meningkatkan keahlian Masyarakat sekitar pelabuhan. (2) Penyerapan tenaga kerja kepada masyarakat sekitar dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada disekitar. (3) Membuat *complaint center* atau *fast responding* untuk mengakomodasi dan menindak lanjuti kekhawatiran masyarakat yang berupa complain. (4) melakukan dan membangun

forum diskusi masyarakat dalam menyelesaikan akses yang terjadi.

Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa masyarakat terdampak merasakan peningkatan peluang usaha dan jasa dalam hal ini laundry, rental mobil dan motor serta layanan telpon. Serta program kegiatan diikuti dengan menyenangkan berupa pelatihan kuliner dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang memberikan pendampingan atas keterdampaan pembangunan pelabuhan tersebut.

Lain halnya informan lain menyatakan bahwa pembangunan pelabuhan tersebut membuka lapangan kerja bagi yang sebelumnya belum bekerja serta usaha yang mampu meningkatkan usaha rumahan. Komunikasi tetap dilakukan dengan pendamping yang memberikan dukungan penuh terhadap dampak pembangunan.

Informan lain yang mengikuti kegiatan juga menyatakan bahwa kegiatan yang diikuti berupa BST, TKBM, Operator Forklift, Kuliner, dan Penjaga keamanan yang mendukung kebutuhan pelabuhan serta tidak memperoleh kompensasi selama periode pemantauan dan pelatihan. Proses komunikasi dilakukan melalui prosedur yang telah dibuat melalui pengaduan keterlibatan tokoh masyarakat sebagai juru bicara.

Terdapat juga bagi beberapa profesi nelayan memperoleh kompensasi pelatihan berupa pelatihan LRP (BST (Pelatihan Keselamatan Dasar), forklift, TKBM) dan pemberian alat tangkap. Dampak yang terjadi dari kegiatan pembangunan pelabuhan Patimban menunjukkan adanya kompensasi yang diberikan pemerintah dari pihak pengembang ke masyarakat berupa

pelatihan, pemberian kompensasi dan memberikan akses pekerjaan dan modal usaha. Prosedur komplain diserahkan kepada pengembang melalui tokoh masyarakat dalam mengantisipasi kekecewaan masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang terjadi sehingga tidak menciptakan kemiskinan dan ketidakberdayaan. (1) pengembangan sumberdaya masyarakat, (2) penguatan ekonomi masyarakat, (3) pemeliharaan hubungan antara pihak pemerintah dan masyarakat.

Pembahasan

Pengembangan sumber daya masyarakat

Pengembangan sumber daya masyarakat dengan meningkatkan keterampilan siap pakai dan kerja sesuai dengan tawaran lowongan yang diberikan oleh pelabuhan melalui perusahaan. Tawaran ini berupa pelatihan dan modal kerja ataupun akses pekerjaan yang bersifat pekerjaan kasar. Program seperti pelatihan kewirausahaan UMKM yang memang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar bisa mempunyai usaha sendiri. Target dari program ini adalah untuk membantu masyarakat yang non ijazah bisa memaksimalkan potensi yang ada disekitar mereka dengan UMKM. Serta agar warga bisa lebih mandiri dan berdiri di kaki sendiri. Respon masyarakat terhadap program program yang dilakukan sangat efektif untuk meningkatkan hubungan baik antara masyarakat dengan perusahaan. Hal ini berlangsung untuk hidup rukun dan berbarengan dalam satu kegiatan usaha bersama. Kegiatan operasional perusahaan pun dapat berjalan dengan lancar tanpa

adanya gangguan-gangguan. Harapan lainnya adalah agar masyarakat sekitar bisa lebih memaksimalkan potensi yang ada pada setiap individunya, dan agar masyarakat bisa lebih produktif dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lain agar angka kemiskinan bisa terus ditekan.

Selain itu pelatihan dan pengembangan difokuskan ke pelatihan yang bersifat berkesinambungan dengan kegiatan pelabuhan yang sudah mulai beroperasi, seperti pelatihan TKBM, BST dan pelatihan jaring yang diberikan kepada nelayan yang memang terdampak langsung dengan pembangunan. Konteks pelatihan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat memiliki kegiatan yang bermanfaat untuk membantu perekonomian mereka sendiri dan tentunya agar terjalin komunikasi yang baik antar perusahaan dan masyarakat.

Penguatan Ekonomi Masyarakat Terdampak

Penguatan ekonomi masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja, khususnya masyarakat sekitar. Kesiapan sebagai tenaga kerja tidak bisa ditentukan berdasarkan wilayah melainkan kembali ke tiap individu yang melamar ke perusahaan melalui serangkaian tes dan training. Namun memang diprioritaskan adalah warga ring 1 atau yang dekat dan bersinggungan langsung dengan Pelabuhan. Kontribusi perusahaan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat bisa dilihat dari salah satu program yang diberikan yaitu penerimaan tenaga kerja skill dan non skill yang memang diprioritaskan kepada masyarakat yang terdampak langsung dalam pembangunan

Pelabuhan Patimban. Harapan kami tentu dengan support yang sudah kami berikan bisa membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan bisa hidup dengan lebih sejahtera. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pihak pengembang dalam hal ini adalah anak usaha badan usaha milik negara berkontribusi banyak dalam mempekerjakan warga yang berdomisili di sekitar Pelabuhan Patimban yang berijazah atau tidak berijazah dan angka pengangguran di wilayah tersebut sudah berangsur mengurang.

Potensi masyarakat dalam penguatan ekonomi yang dirasa sangat berpengaruh dalam meningkatkan usaha dalam program diantaranya dalam bidang Pertanian atau budidaya seperti diberikan pelatihan budidaya untuk dijadikan mata yang nantinya jika sudah berjalan dan menghasilkan. Banyak warga yang menjadi berpenghasilan dan tentunya dari bekerja kualitas hidup dan ekonomi masyarakat

Pemeliharaan Hubungan Antara Pihak Pemerintah Dan Masyarakat.

Pemeliharaan hubungan relasional antara pemerintah dan masyarakat memberikan angin segar dengan mengedepankan solusi dan komunikasi yang diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini perlu difokuskan pada pendekatan sumber, proses dan sasaran dari masyarakat (Renyaaan, Mantiri, & Kasenda, 2019). Dalam pelaksanaannya sering komunikasi menjadi masalah dalam menemukan titik temu dari kehendak masing-masing masyarakat dan pemerintah serta swasta (Lesmana & Wibowo, 2021). Sejauh ini hubungan korporasi dengan masyarakat berjalan lancar, komunikasi dua arah dan

berkesinambungan. Adanya CSR ini menambah erat hubungan perusahaan dengan masyarakat (Bahri, 2016). Pola hubungan atau jaringan sosial dari perusahaan ke masyarakat adalah melalui lurah/ kepala desa, RT/RW, tokoh masyarakat, koramil dan juga babinsa memaparkan bahwa konsistensi kami dalam menjalankan program CSR dan juga memberikan perhatian lebih ke masyarakat adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis.

Perkara yang pelik dalam hubungan akan diselesaikan melalui akar rumput di masyarakat dengan mengedepankan pihak tokoh dan urun rembuk dalam satu sistem musyawarah dengan mengedepankan kehendak dari masyarakat. RT/RW, tokoh pemuda untuk bertemu dengan perwakilan perusahaan dalam ruang diskusi dan musyawarah. Buah dari diskusi tersebut biasanya langsung di eksekusi oleh perusahaan ataupun bisa menjadi program CSR berikutnya, tergantung dengan korelasinya.

Kendala dari program CSR yang terjadi di masyarakat kurang bisa memanfaatkan program yang sudah dibangun dengan baik dan masyarakat belum mampu memetakan kepentingan masing-masing kebutuhan mereka. CSR sejauh ini diselenggarakan sesuai dengan apa yang warga butuhkan karena warga pun selalu berkomunikasi dengan perusahaan untuk program CSR selanjutnya dan agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi adapun beberapa kebutuhan yang dirasa masih kurang memadai untuk masyarakat yaitu bantuan air bersih untuk dikonsumsi dan layak minum bukan hanya untuk kebutuhan mencuci saja.

Kesesuaian program CSR adalah langkah perusahaan untuk mendapat kepercayaan masyarakat, program CSR yang tepat akan berbanding lurus dengan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. CSR merupakan tanggung jawab perusahaan yang mengemban akibat keterdampaan dari pembangunan yang dikelolanya (Fahrial, Utama, & Dewi, 2019). Selain itu interaksi perusahaan dan masyarakat harus selalu terjaga, perusahaan selalu membuka diri dan membuka akses komunikasi dan juga mengutus perwakilan sebagai penyambung lidah antara masyarakat ke perusahaan jika ada hal yang perlu disampaikan. Beberapa penelitian tentang CSR memperlihatkan bahwa program yang dibangun dapat berupa pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastuktur, pengembangan lembaga dan lingkungan sosial dan budaya (Gea, Saleh, & Suharto, 2022). Hal-hal ini tergantung dari kondisional yang terjadi di masyarakat itu sendiri.

Kendala yang didapat adalah kurangnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat ataupun dalam merangkul agar masyarakat bisa membaur untuk mengikuti kegiatan yang sedang dilakukan oleh pihak perusahaan. Pihak yang diberikan kepercayaan negara kepada pihak usaha milik negara dalam merangkul kebutuhan masyarakat yang terdampak pada pembangunan pelabuhan. Penghambat dalam kegiatan ini adalah dari masyarakat sendiri yang kurang bisa memanfaatkan pembangunan yang sudah di berikan oleh perusahaan sebab mereka juga tidak mengembangkan dan membangun untuk

lebih baik sehingga program yang sudah dijalankan tidak berjalan dengan baik. CSR merupakan bagian dari pembangunan yang mengedepankan kesadaran dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan pihak perusahaan. Pembentukan forum dalam setiap permasalahan dimungkinkan harus terjadi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan (Sitepu & Maulana, 2021).

Kondisi dari keterdampaan yang dilihat dalam potret sosial terlihat bahwa negara dalam hal ini pemerintah melalui pihak ketiga telah membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang terkena dampak. Peluang usaha bagi masyarakat lokal yang terkena dampak, dan membuka peluang usaha di kawasan pelabuhan sesuai program LRP. Membangun prosedur pengaduan dengan mengembangkan ruang dialog yang bertingkat. Membangun perbaikan jalan rusak dan jalan baru serta membantu Meningkatkan ekonomi masyarakat yang terkena dampak dengan pemodalan dan keterampilan serta akses masuk ke pelabuhan. Sunaryo (2015) melihat bahwa pengelolaan CSR merupakan dampak pembangunan yang ditanggung oleh perusahaan dan negara yang merupakan suatu kewajiban. Hal yang utama perlu diperhatikan adalah aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya masyarakat yang terkena dampak dan ini merupakan amanat dari undang-undang dasar.

CSR atau dikenal dengan TJS (Tanggung Jawab Sosial) mampu meredam gejala yang dihadapi pembangunan. Pembangunan yang sudah pasti memberikan dampak dari aktivitas penggusuran dan pembangunan memiliki andil kepada

menihilisasi keberadaan ekologi dan ekosistem yang berada di lingkungan setempat. Oleh karena itu masyarakat sebagai sumber program dan aktor program pembangunan harus mampu memanfaatkan tawaran pembangunan dengan melakukan konsolidasi yang kuat.

Penguatan konsolidasi masyarakat dalam tingkat aras masyarakat yang terdampak perlu di koordinasikan dengan pihak pemerintah di tingkat lokal dan perusahaan pihak ketiga sebagai bagian dari perwakilan pemerintah. Kemampuan komunikasi masyarakat akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemeliharaan hubungan ini ditampakkan pada kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan yang mampu meminimalisasi dampak ketidakterimaan masyarakat.

Program perekrutan sebagai pekerja, pemberian bantuan usaha dan perlengkapan nelayan, pembangunan infratraktur serta program lain yang akan di diskusikan lebih lanjut mampu menutupi dampak sosial pembangunan. Pada dasarnya wilayah Desa Patimban sendiri adalah desa yang terkategori desa berkembang dimana mayoritas masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang tidak seburung desa yang makmur. Hadirnya pembangunan pelabuhan memberikan peluang baru bagi masyarakat dan desa sendiri. Meskipun mereka harus kehilangan beberapa bagian tanah mereka. Hal ini ditambah perhitungan dengan kondisi lahan yang sering tergenang ketika air laut naik. Hitung-hitungan masyarakat memberikan dampak yang positif dan memberikan peluang baru untuk kehidupan yang lebih baik.

SIMPULAN

Pelabuhan Patimban dapat memberikan dampak positif di masyarakat. Utamanya dampak ekonomi dan mobilitas sosial. Selain itu memberikan dampak lingkungan yang bagus, meningkatkan aktivitas perekonomian Masyarakat, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Warga yang terdampak di data dan masuk dalam data base dilakukan pembinaan dengan skema yang didiskusikan bersama. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya pembangunan pelabuhan Patimban dengan dikoordinasi melalui tokoh masyarakat setempat.

Saran penelitian ini adalah pelabuhan merupakan akses umum yang dapat memberikan dampak positif dan negatif. Oleh karena itu pemerintah hendaknya mengantisipasi dampak negatif yang terjadi terutama gejolak sosial dan penyimpangan sosial yang terjadi di areal pelabuhan. Selain itu pemerintah perlu menerapkan sistem yang disosialisasikan di masyarakat terhadap sistem kerja pelabuhan yang ada agar berjalan dengan sesuai operasional yang berlaku pada sistem keamanan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2016). Peran CSR dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Masyarakat di Daerah. . *Warta Dharmawangsa*, 47 .
- Fahrial, F., Utama, A. S., & Dewi, S. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap pembangunan perekonomian desa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 251-264.
- Gea, I. V., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2022). Peranan corporate social responsibility (CSR) terhadap tingkat pembangunan desa. *INOVASI*, 18(3), 551-560.
- Hamzah, A., & Suhendar, D. (2020). Financial Inclusion Model on the Development of Batik SMEs in Cirebon Regency. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 7(2), 95-104.
- Hamzah, F., Hernawan, H., & Wigati. (2018). Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 5(3).
- Iryana, A. B. (2018). Analisis Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kecamatan Pusakanegara terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 21-40.
- Kurniawan , W. (2015). Dampak sosial ekonomi pembangunan pariwisata umbul sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 4(4), 443-451.
- Kurniawan, M. A. (2021). Pengembangan Destinasi Pariwisata Perlindungan dan Pelestarian Budaya Kota Cirebon. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 1(1).
- Lesmana, D., & Wibowo, B. R. (2021). Analisis Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Kecamatan Teluk Pandan Dan Bengalon). *Jurnal Riset Pembangunan*, 3(2), 78-87.

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Renyaan, B. M., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2019). Efektivitas Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Freeport Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1-11.
- Sitepu, P. A., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (Csr) Melalui Konsep Collaborative Governance dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 80-90.
- Suherman, A., & Dault, A. (2009). Dampak sosial ekonomi pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan nusantara (PPN) pengambengan jembrana Bali. *Jurnal Saintek Perikanan*, 4(2), 24-32.
- Sunaryo. (2015). Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 264-267.
- Yusuf, H., Moedikdjo, K., Saeni, M., & Nasution, L. (2005). Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus di Pelabuhan Perlkanan Lempasing, Bandar Lampung). *Buletin Ekonomi Perikanan*, 6(1), 57-64.